

A. *The End of History* hari ini

Berbicara tentang relevansi teori yang didengungkan oleh Fukuyama 27 tahun silam dengan tesisnya yang mengatakan bahwa tidak ada penantang berarti bagi demokrasi liberal dan kapitalisme maka jawaban penulis adalah ya, memang tidak ada penantang yang berarti bagi demokrasi dan kapitalisme pasca runtuhnya tembok Berlin dan porak porandanya Soviet untuk saat ini, tetapi bukan berarti itu semua merupakan akhir dari sejarah dimana liberalisme yang mengusung demokrasi dan kapitalisme menjadi akhir dari perjalanan pergolakan ideologi umat manusia. Meningkatnya jumlah negara penganut demokrasi bisa kita katakan sebagai tren positif dari tesis Fukuyama dimana dalam beberapa kurun waktu terakhir tidak kita temui negara yang tadinya non-demokrasi lalu berubah menjadi demokrasi dan akhirnya berubah kembali menjadi penganut non-demokrasi. Demokratisasi adalah fenomena yang jamak terjadi di negara-negara penganut sistem non-demokrasi, kejadian yang paling baru adalah peristiwa *Arab Spring* yang menandakan jatuhnya kekuasaan diktator di Tunisia sebagai *starting point* gelombang demokratisasi di wilayah Arab dan Afrika.

Disisi yang sama juga tidak bisa kita elakkan bahwa demokrasi dan kapitalisme bukanlah sistem yang serta merta sempurna, terhindar dari carut marut persoalan dan masalah yang mengikutinya. Seperti yang penulis paparkan di bab-bab sebelumnya berbagai problema datang membayangi yang menandakan bahwa ternyata terlalu dini untuk kita menyimpulkan bahwa demokarsi liberal dan

kapitalisme menjadi *world's default system*. Penulis menyimpulkan bahwa *default system* yang dipropagandakan oleh Fukuyama merupakan pemikiran *endisme* yang seharusnya tidak dilontarkan karena sesungguhnya sistem tersebut tidak berlaku karena setiap negara bergulat dengan sistem versinya masing-masing, ketika suatu sistem dipaksa diterapkan pada negara yang memiliki latar belakang dan kondisi yang berbeda maka tujuan demokrasi tidak akan tercapai dan menciptakan kerusuhan dan masalah baru bagi negara yang mengalami transisi demokrasi.

Teoris politik Benjamin Barber menyatakan bahwa Fukuyama melakukan kesalahan dengan mengatakan bahwa kemenangan sementara Amerika atas unipolaritas sebagai *end of history* yang permanen dimana ia menyebutkan untuk Dunia yang penuh konflik seperti nasionalisme Balkan, genosida Rwanda dan terorisme Islam hal tersebut dapat disebut sebagai kekeliruan. Ketika suatu sistem menjadi sebuah *default* maka yang seharusnya terjadi adalah sebuah keadaan dimana kondisi negara-negara relatif lebih aman dan geliat-geliat dari ideologi lain selain demokrasi liberal bukanlah sebuah tinta besar yang mencoreng sejarah manusia seperti yang terjadi pada 9/11. Fareed Zakaria paska kejadian 9/11 menuliskan artikelnya yang berjudul *The End of The End of History* yang menuliskan bahwa Barat menimbulkan ancaman bagi penganut Islam radikal yang cenderung bersikap buta, meskipun Fukuyama mengatakan bahwa Islam radikal tidak memiliki daya tarik ideologis yang melampaui batas-batas Dunia muslim. Kejadian 9/11 menurut Zakaria juga merupakan bentuk bahwa unipolar yang didengungkan oleh Amerika telah mencapai akhirnya dimana Amerika juga “butuh” negara lain untuk menyelesaikan

dengan mencoba merebut kembali bekas wilayahnya yang hilang. Sedangkan China yang menurutnya juga masih terlalu sibuk berkuat dengan masalah Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Dalam artian filsafat ia mengatakan bahwa proses modernisasi ekonomi dan politik tidak akan bergerak ke arah komunisme, tetapi cenderung mengarah kepada kebebasan. Ia mengatakan masalah yang dihadapi Dunia pada hari ini adalah bukan kepada bagaimana pergerakan kekuatan otoriter tetapi lebih kepada banyaknya negara-negara yang tidak menjalankan demokrasi sebagaimana seharusnya.³

Penulis setuju dengan pernyataan yang terakhir bahwa tren pemerintahan otoriter tidak akan melakukan ekspansi kepada negara-negara lain karena di era modernisasi sekarang ini sepertinya faham ini akan terlihat sangat *out to date* dimana penulis memperkirakan bahwa tidak akan ada negara demokrasi yang akan beralih kepada pemerintahan otoriter. Meskipun hal itu masih mungkin saja terjadi kepada negara yang menggunakan kekuatan militer untuk menggulingkan pemerintahan yang sah tetapi penulis yakin ia tidak akan mengilhami negara tetangganya untuk melakukan hal yang sama. Sejarah tidak akan mundur kebelakang dengan mengulang “kecelakaan sejarah” masa lalu, ia akan maju kedepan menyesuaikan evolusi sejarah manusia yang harus beradaptasi dengan perkembangan kekinian.

Untuk pernyataan pertama tentang kebebasan tentu ada yang harus kita lihat kembali. Di bab sebelumnya penulis telah memberikan fakta bahwa kebebasan di

³ Francis Fukuyama, “At the ‘End of History’ Still Stands Democracy” <http://www.wsj.com/articles/at-the-end-of-history-still-stands-democracy-1402080661> (Rabu, 30 November 2016)

kebangkitan kaum populis.⁷ Sumber lain menyebutkan defenisi populisme sebagai “suatu bentuk khas retorika politik, yang menganggap keutamaan dan keabsahan politik terletak pada rakyat, memandang kelompok elit yang dominan sebagai korup, dan bahwa sasaran-sasaran politik akan dicapai paling baik melalui cara hubungan langsung antara pemerintah dan rakyat, tanpa perantara lembaga-lembaga politik yang ada” (Abercrombie et. al., 1998).⁸

Jika melihat sejarah masa lalu Polandia dan Hungria sebagai mantan penganut sistem komunisme rasa-rasanya sah saja jika mereka mencoba untuk memunculkan “jati diri” mereka kembali dimana liberalisme dirasa para pemimpinnya bukanlah bagian dari mereka. Kedua pemerintahan tersebut dipilih secara demokratis oleh rakyatnya dimana mereka mengadakan pemilu yang memenuhi standar demokratis, tetapi apa yang mereka lakukan sekarang merupakan cerminan dari apa yang dikatakan oleh Schmitter alias tidak perlu susah-susah mengaitkan demokrasi dengan liberalisme karena keduanya memang tidak berhubungan. Polandia, Hungaria, Ceko dan Slovakia juga merupakan negara di Eropa yang menolak tentang hukum imigrasi. Tidak seperti negara Eropa lainnya yang cenderung terbuka pada imigran contohnya

⁷ Fareed Zakaria, “Populism on the March; Why the West is in Trouble” <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-10-17/populism-march> (Jumat, 2 Desember 2016)

⁸ Saidiman Ahmad, “Populisme; Madu atau Racun Bagi Demokrasi” <http://www.saifulmujani.com/blogs/populisme-madu-atau-racun-bagi-demokrasi>(Jumat, 2 Desember 2016)

Jerman, negara diatas cenderung menolak para imigran muslim dan tidak mengharapkan adanya heterogenitas dalam masyarakat mereka.

Ada satu tulisan menarik yang sedikit membawa cara pandang baru bagi penulis tentang sebenarnya apa yang terjadi pada Dunia yang semakin tidak menentu ini. Tulisan dari seorang dosen Harvard University tentang “matinya demokrasi dalam satu minggu”, tulisan ini diterbitkan di bulan Agustus tahun 2016 dimana banyak rentetan kejadian yang jika disatukan akan membentuk sebuah pola akan datangnya sesuatu baru yang masih belum diketahui apa itu. ia menyebutkan krisis politik di London, serangan teroris di Nice, Perancis; kudeta gagal di Ankara, Turki; dan pencalonan Trump sebagai presiden Amerika Serikat adalah skenario yang saling terhubung. Jika dilihat dari jarak yang tepat, rangkaian kejadian tersebut mengisahkan kisah sistem politik, demokrasi liberal, yang telah lama mendominasi Dunia yang sekarang tengah melakukan perjuangan mati-matian untuk kelangsungan hidupnya sendiri. Ia menyebutkan dalam pembukaan artikelnya dengan “Hari-hari gelap musim panas ini menunjukkan bagaimana pemerintahan oleh rakyat-dilanda iliberal populis di satu sisi dan elit tidak demokratis di sisi lain-siap untuk punah”.⁹

Fenomena terpilihnya Trump (terlepas dari isu adanya campur tangan Russia dalam kemenangan Trump) dan bangkitnya kaum populis di Amerika menjadi satu indikator akan munculnya fenomena iliberal demokrasi, dimana orang akan cenderung

⁹ Yascha Mounk, “The Week Democracy Died” http://www.slate.com/articles/news_and_politics/cover_story/2016/08/the_week_democracy_died_how_brexit_nice_turkey_and_trump_are_all_connected.html (Jumat, 2 Desember 2016)

tertutup dengan sesuatu yang baru dan menganggap perbedaan menjadi ancaman. Seperti yang ditulis seorang kolumnis pada laman *New York Times* bahwa ada tiga faktor utama yang menyebabkan bangkitnya gerakan macam ini. Yang pertama adalah ketakutan akan perubahan sosial. Isu yang paling mencolok adalah tentang masalah imigran dimana Amerika dan Eropa menjadi negara yang paling dituju oleh para imigran, hal ini menurut penduduk lokal akan memicu konflik karena didasari dari budaya yang berbeda. Dengan kampanye “tembok” Trump yang kontroversial dan rencana untuk mendeportasi para imigran muslim menjadi isu utama yang menarik perhatian untuk kaum populis. Faktor yang kedua adalah anggapan akan adanya serangan fisik. Penelitian menunjukkan bahwa ancaman fisik akan membuat masyarakat secara terpaksa untuk memilih pemimpin yang memprioritaskan keamanan di atas segalanya. Faktor yang ketiga adalah runtuhnya identitas putih. Putih disini tidak mengacu pada mereka yang berkulit putih tetapi lebih kepada mayoritas kelompok yang secara tradisional menikmati hak istimewa dengan label “kami” daripada “mereka” baik secara budaya maupun politik.¹⁰

Dilain pihak kita tidak bisa menyalahkan apa yang terjadi dengan Trump, karena ia terpilih melalui prosedur demokrasi yang sah dan diakui legitimasinya. Yang menjadi titik fokus adalah tentang situasi yang membuat masyarakat menginginkan Trump dengan mengantarkannya menjadi presiden Amerika. Di zaman

¹⁰ Amanda Taub, “Trump’s Victory and the Rise of White Populism” http://www.nytimes.com/2016/11/10/world/americas/trump-white-populism-europe-united-states.html?_r=0 (Jumat, 2 Desember 2016)

liberalisasi dimana globalisasi menjadi keniscayaan seperti halnya ada ketakutan dan ketidaksiapan dari masyarakat lokal untuk menghadapi manusia dari belahan bumi yang lain. Demokrasi yang seharusnya ikut menyongsong keadaan keterbukaan ini akhirnya harus “mengalah” kepada masyarakatnya yang memiliki kecemasan berlebih terhadap sesuatu yang asing. Demokrasi yang baik harusnya mampu melindungi hak warganya dan memastikan bahwa semuanya berada dalam posisi yang sejajar, tetapi prakteknya tidak selalu begitu. Demokrasi harus menjadi liberal demi menjamin dan memproteksi hak warganya agar tidak dirampas oleh para pendatang, setidaknya hal itulah yang penulis tangkap dengan situasi yang ada saat ini.

Sebagai pemimpin negara adidaya apakah Trump mampu mengembalikan citra demokrasi yang sempat ternoda dengan isu ketimpangan, imigran, dan stagnansi ekonomi? Satu hal yang harus kita ingat bahwa tidak ada fokus kampanye Trump untuk menyebarkan demokrasi. Situasi juga akan semakin sulit manakala negara-negara Eropa seperti Hungaria dan Polandia yang menjadi contoh baik peralihan negara non demokrasi menjadi negara demokrasi dilanda isu mengenai demokrasi yang represif.

Ada beberapa alasan untuk menjadi skeptik mengenai masa depan demokrasi ditangan Trump. Semenjak kebijakan luar negeri Amerika bersifat pragmatis maka demokrasi tidak akan berjalan kemana-mana atau mungkin akan mengalami kemundurannya. Abdel Fatah el-Sisi berasumsi bahwa di bawah pemerintahan Trump, tekanan untuk mendemokratisasi dari Obama akan luntur. Begitu juga yang

terjadi dengan pemerintahan Duterte dimana ia mengadili bandar dan pemakai narkoba tanpa melalui proses persidangan, jika Trump masih bersifat pragmatis maka isu HAM yang menjadi dasar esensial faham demokrasi akan ternodai begitu saja dengan pemerintahan Duterte yang ironisnya menganut demokrasi.¹¹

Dengan pernyataan Diamond diatas maka mungkin di tahun depan *Freedom House* akan muncul dengan survey terbarunya mengenai indeks kebebasan di seluruh Dunia yang semakin menurun. Negara-negara penganut demokrasi akan menjadi semakin tidak demokratis karena “induk”nya untuk saat ini lebih fokus memproteksi dirinya sendiri. Ancaman Russia, Tiongkok dan bahkan ISIS tentang ekspansi ideologi kiranya bisaa menjadi pertimbangan bagi Trump untuk merubah rencana awal dan beralih ke *Plan B*. Hal senada juga diungkapkan oleh Richard Fontaine yang mengatakan bahwa Amerika tidak bisa berjalan menjauh begitu saja karena jika hal tersebut benar-benar dijalankan oleh pemerintahan Trump maka tatanan liberal akan layu yang akan menciptakan dampak berbahaya diantaranya perang yang merusak, depresi ekonomi dan munculnya kediktatoran.¹²

Melihat keadaan politik terkini maka bisa penulis simpulkan bahwa dalam waktu dekat mungkin demokrasi akan tetap masih digunakan di negara-negara dan masih ada kemungkinan negara non demokrasi beralih kepada demokrasi tetapi

¹¹ Larry Diamond, “Democracy After Trump; Can a Populist Stop Democratic Decline?” <https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2016-11-14/democracy-after-trump> (Jumat, 2 Desember 2016)

¹²Richard Fontaine, “ How Trump Can Save The Liberal Order” <https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2016-11-30/how-trump-can-save-liberal-order> (Jumat, 2 Desember 2016)

mungkin akan ada sedikit perbedaan dalam prakteknya dimana demokrasi yang identik dengan liberalisme akan berubah menjadi demokrasi yang iliberal dimana dengan kebangkitan paham populisme negara akan melakukan batasan-batasan untuk mengamankan kepentingan dalam negerinya atau mengamankan kekuasaan rezim yang berkuasa.

B. Wajah Demokrasi Indonesia

Berbicara tentang demokrasi tentu tidak lengkap rasanya jika tidak kita lihat wajah demokrasi dewasa saat ini. Menjamurnya fenomena demokrasi tentu menjadi menarik untuk kita lihat bagaimana negara-negara Dunia menerapkan demokrasiya. Demokrasi tentu membawa hawa dan wajah baru bagi negara penganut sistem non-demokrasi sebelumnya, ia merupakan lambang perwujudan hak asasi manusia yang sebenarnya karena merupakan fitrah manusia untuk terlahir sebagai seorang individu yang merdeka. Kemerdekaan dan kebebasan ini di implementasikan dengan pemilihan umum dimana suara setiap individu menjadi penting dan berarti untuk menentukan arah kemajuan bangsa. Hak warga negara untuk menjalankan kebebasan pers, memiliki properti dan diperlakukan sama di depan hukum menjadi sesuatu yang baru bagi warga negara yang lama dipimpin oleh sistem otoriter, fasisme dan junta militer. Tentu hal-hal indah semacam itu menjadi daya tarik bagi warga negara yang berada dalam belenggu rezim yang jahat untuk menerapkan sistem demokrasi dan menuntut hanya untuk menjadi manusia yang merdeka.

Tetapi sekarang mari kita lihat bagaimana dan apa yang terjadi bagi negara pengimpor demokrasi dewasa ini. Wajah negara-negara yang telah dipermak ini patut untuk kita lihat sebagai bahan refleksi atas apa yang telah diperbuat demokrasi selama ini. Penulis tidak akan mengekspos sisi indah demokrasi yang sudah sama-sama kita tahu sebagai sesuatu yang positif untuk diterapkan, tetapi penulis akan mencoba untuk melihat efek samping demokrasi yang terjadi di negara kita tercinta, Indonesia dan bagaimana sejauh ini demokrasi membawa dampak yang mengubah wajah kita.

Dengan tingkat partisipasi yang relatif tinggi dalam pemilu jika dibandingkan dengan negara lain, agaknya kita akan mengatakan bahwa tren demokrasi kita bergerak ke atas, tetapi tren positif ini apakah menjadi wajah sesungguhnya demokrasi kita? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Ada hal yang harus kita tandai sebagai efek samping demokrasi terutama praktek demokrasi liberal. Ketika kita berbicara tentang wajah muram demokrasi di Indonesia hari ini maka kita akan berbicara tentang bagaimana tingkat korupsi yang merupakan masalah klasik bagi bangsa ini. Menurut data yang didapat dari *tradingeconomics.com* bahwa poin rata-rata indeks korupsi di Indonesia adalah 24.72 point dari tahun 1995-2015, berikut adalah grafiknya. Dari tabel 4.1 dibawah bisaa kita simpulkan bahwa meningkatnya tren demokrasi juga diikuti dengan meningkatnya tren korupsi, dan tabel 4.2 menunjukkan bahwa tren peningkatan ini telah terjadi semenjak 17 tahun terakhir, bahkan prediksi yang dibuat pun mengatakan bahwa indeks ini akan naik ditahun

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa demokrasi yang tidak dewasa dapat memicu kelakuan beberapa oknum untuk memperkaya dirinya dan kelompoknya. Mandulnya sistem kaderisasi partai membuat masyarakat tidak memiliki kandidat-kandidat terbaik untuk berada dalam pentas pemilu, yang berakhir dengan kita memilih kandidat yang tampak berpihak pada kesejahteraan rakyat tetapi pada ujungnya mengkhianati rakyat. Harus kita akui bahwa demokrasi akan berjalan dengan sepenuhnya ketika salah satu mesin demokrasi yaitu partai politik menjadi tempat terpercaya rakyat dalam menyampaikan aspirasi mereka.

Salah satu indikasi lain maraknya aktivitas korupsi tidak lain dan tidak bukan adalah harga demokrasi yang terlampau mahal. Estimasi biaya yang dihitung oleh beberapa analis bagi kandidat yang ingin maju ke parlemen adalah sebesar \$30.000, dan untuk merebut kursi kepresidenan biaya yang dibutuhkan adalah sekitar \$100 juta. Angka itu belum termasuk biaya yang dikeluarkan untuk donasi-donasi informal dan pengeluaran-pengeluaran lain.¹³ Tentu dengan pengeluaran sebanyak itu seorang politikus tidak mungkin untuk tidak memikirkan kembalinya modal politik mereka, sesungguhnya sangat naif menghabiskan milyaran rupiah hanya untuk mendengarkan aspirasi rakyat dan memperkaya diri serta kelompok merupakan salah satu agenda penting. Grafik diatas yang menunjukkan tren peningkatan merupakan

¹³ Evan A. Laksamana, "Is Indonesia Really a Democracy?" <http://foreignpolicy.com/2009/11/10/is-indonesia-really-a-democracy/> (Jumat, 3 Februari 2017)

sesuatu yang masuk akal dimana kebutuhan semakin bertambah, modal politik pun akan semakin bertambah.

Satu hal lain yang menjadi faktor penyumbang tak terbentuknya praktek korupsi adalah masih lemahnya tingkat pendidikan dan pendapatan rakyat Indonesia. Pendidikan disini bukan hanya terkait masalah pendidikan formal melainkan juga pendidikan politik yang seharusnya didapat secara memadai baik dari pemerintah, partai politik maupun LSM terkait. Satu fakta menarik yang harus kita ketahui adalah ternyata rakyat Indonesia tidak terlalu tertarik dengan politik yang menyebabkan kita harus memikirkan kembali kualitas dari hasil pemilu kita. Penelitian yang dilakukan oleh Indikator Politik pada tahun 2013 menunjukkan presentase masyarakat yang tertarik mengenai masalah politik. Dengan angka tidak mencapai 30% bisa penulis katakan bahwa demokrasi ini bisa dikatakan tidak berjalan dengan sebagaimana seharusnya.

Cerita kelam lain yang dihasilkan oleh demokrasi di era milenium sekarang ini adalah maraknya fenomena *hate speech* atau ujaran kebencian di internet. Demokrasi menjamin setiap orang untuk mengutarakan pendapatnya baik secara langsung ataupun melalui perantara media, tetapi praktek demokrasi yang kebablasan yang disertai dengan ketidakbertanggungjawaban dalam memanfaatkan media internet menjadi malapetaka tersendiri. Demokrasi dan kebebasan internet merupakan suatu keuntungan jika dimanfaatkan dengan baik, tetapi akan menjadi bencana ketika dipakai untuk menyebar kebencian yang tidak beralasan kepada pemerintah, instansi maupun organisasi tertentu. Ujaran kebencian juga cenderung mengarah kepada pemberitaan berita palsu, biasanya dengan motif dan tujuan tertentu orang menggunakan media internet untuk menjatuhkan lawan politik atau pemerintah yang berkuasa. *Black Campaign* merupakan tujuan tersembunyi dari adanya ujaran kebencian dan penyebaran berita palsu, seperti yang sedang marak pada media internet Indonesia akhir-akhir ini. Isu-isu sensitif seperti agama, ras dan suku menjadi pemantik yang cukup ampuh mengingat latar belakang masyarakat Indonesia yang beragam.

Selain itu, praktek demokrasi yang masih muda ini juga tidak hanya menimbulkan dua masalah diatas, hal yang paling mungkin terjadi adalah praktek KKN dan munculnya dinasti politik. Dua hal ini menjadi topik hangat yang diperbincangkan dalam politik Indonesia akhir-akhir ini. Para elit politik yang berkuasa mencoba “mengamankan” posisinya dimasa depan dengan menaruh sanak

famili, kerabat dan sahabat dalam posisi tertentu dalam pemerintahannya dan bahkan “mewariskan” kekuasaan tersebut kepada anak maupun istrinya. Praktek ini sudah menjadi hal yang lumrah kita lihat untuk kondisi saat ini. Praktek-praktek seperti ini harusnya tidak terjadi di negara penganut demokrasi karena elit yang melakukan praktek ini cenderung memiliki pemerintahan yang korup dan tidak bersih.

C. Ideologi Masa Depan

Karl Mannheim seorang sosiolog berdarah Hungaria-Jerman dalam karyanya yang berjudul *Ideologi dan Utopia* menawarkan pengertian baru tentang Ideologi. Jika dalam pengertian populernya ideologi dimaknai sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Pengetahuan yang bersifat ideologis berarti pengetahuan yang lebih sarat dengan keyakinan subyektif seseorang, dari pada sarat dengan fakta-fakta empiris. Kalau dalam sebuah perdebatan, salah satu pihak menuduh argumen pihak lainnya bersifat ideologis ini artinya yang dituduh bersikap subyektif tidak kritis lagi dengan kebenaran yang ada.

Sementara Mannheim sendiri memberikan penawaran baru tentang pengertian ideologi dan utopia. Sesuai dasar pemikirannya dalam memperkenalkan Sosiologi Pengetahuan. Dia membedakan fakta empiris yang sudah ada atau sedang terjadi dan gejala sosial di masa depan yang belum terjadi. Dalam pandangan Mannheim ideologi dan utopia adalah hal yang sama dengan setitik perbedaan, keduanya merupakan gejala sosial di masa depan dan belum terjadi sehingga keduanya bukan data empiris.

Sedangkan perbedaan antara ideologi dan utopia sendiri menurut sangatlah tipis. Ideologi semacam proyeksi kedepan tentang gejala yang akan terjadi di kemudian hari berdasarkan sistem yang ada. Maka disinilah pikiran baru Mannheim, ideologi berarti ramalan tentang masa depan yang didasarkan pada sistem yang saat ini sedang berlaku, sedangkan utopia berarti ramalan tentang masa depan yang didasarkan pada sistem lain, yang saat ini tidak sedang berlaku. Bagi Mannheim terdapat dua macam utopia yakni. Pertama utopia relatif yaitu utopia yang dapat direalisasikan dalam sebuah sistem kemasyarakatan yang berlainan dari sistem yang sedang berlaku sekarang. Kedua utopia absolut, yaitu utopia yang tidak dapat direalisasikan kapan pun dan dimana pun.

Pandangan Mannheim tentang ideologi dan utopia ini sesuai dengan prinsip yang dibicarakannya dalam sosiologi pengetahuan, bahwa pada dasarnya pengetahuan manusia tidak bisa dilepaskan dari eksistensinya. Orang yang menganut ideologi dari sebuah sistem kemasyarakatan tertentu akan sulit melihat kebenaran dari sebuah teori kemasyarakatan lain yang tidak didasarkan kepada sistem yang ada, karena bagi penganut ideologi dari sistem kemasyarakatan yang ada adalah kepentingannya untuk mempertahankan sistem ini. Hal ini lah yang dilakukan Francis Fukuyama dan pendukungnya ketika dia melahirkan tulisannya yang menyatakan bahwa pemenang sejarah adalah kapitalisme dan demokrasi liberal, dan tesis ini tetap dipertahankannya sampai hari ini. Baginya semua kemungkinan utopis didefinisikan sebagai utopia absolut yang sama sekali tidak akan terealisasikan.

Sedangkan kekuatan sebenarnya pada utopia adalah sebagai alat pemelihara kepentingan-kepentingan perkembangan dalam masyarakat. Mannheim menyarankan kita agar melihat masyarakat secara dialektis untuk menetapkan utopia yang sesungguhnya, yaitu gagasan potensial yang terwujud. Hal ini lah yang dilakukan oleh para penggugat kemapanan kapitalisme dan demokrasi liberal seperti Fareed Zakaria, aktor politik di Amerika Latin seperti mendiang Rafael Hugo Chavez Frias dan Evo Morales. Intinya gugatan yang dialamatkan kepada tesis Francis Fukuyama yang memenangkan kapitalisme dan demokrasi liberal 27 silam merupakan bentuk dari pertarungan antara ideologi dan utopia sebagaimana yang dikatakan Karl Mannheim jauh delapan dekade sebelumnya. Ideologi sebagai pemelihara sebuah sistem yang berlaku di masyarakat saat ini sedangkan utopia adalah alat pemelihara sekaligus pendorong perkembangan masyarakat.

Konsep Ideologi akan selalu ada dalam masyarakat yang merdeka, dan ia akan terus bertransformasi menuju bentuk yang paling sesuai demi kebutuhan saat itu. Pergolakan ideologi manusia tidak hanya terbatas pada demokrasi liberal dan kapitalisme, terlalu tergesa-gesa bagi seorang Fukuyama untuk menghakimi akhir sejarah karena 27 tahun setelah tulisannya, sejarah tidak pernah benar-benar berakhir.

Ketika kita berbicara tentang ideologi masa depan maka jelas tidak ada tempat untuk Fasisme Totaliter, orang-orang akan semakin cerdas dan terbuka untuk mengakhiri pemerintahan tirani dan tidak ada tempat untuk pemimpin yang fasis. Selama rezim Nazi (1933-1945), Jerman adalah yang paling berkuasa diantara negara-negara fasis yang ada pada waktu itu. semenjak kalahnya negara “As fasis”

bagaimana proses demokrasi dan kapitalisme tersebut berbaur dengan kondisi awal negara setempat.

Setiap negara mempunyai masa lalu, pandangan dan filosofinya tersendiri dalam melihat arah laju perkembangan negaranya. Demokrasi sebagai sesuatu yang bisa dikatakan baru dan asing menjadi ideologi yang bukan berasal dari pemikiran mereka sendiri membutuhkan *adjustment* atau penyesuaian dan filter dalam prakteknya. Negara-negara yang benar-benar bisa menerapkan demokrasi dan kapitalisme sebagai ideologi “import” mereka bukanlah negara yang benar-benar murni menerapkan seluruh ajaran dan filosofi dari demokrasi dan kapitalisme karena ia pasti akan berbenturan dengan kearifan lokal negara tersebut.

Kandidat potensial untuk mengimbangi kekuatan Amerika Serikat dimasa depan adalah Tiongkok, ia mempunyai sistem pemerintahan yang “modern” tetapi juga tidak serta merta meninggalkan masa lalu mereka sebagai penganut sosialisme. Tidak seperti tetangganya Korea Utara yang tertutup dan cenderung tidak bergaul, Tiongkok membuka dirinya selebar-lebarnya untuk membuka peluang baru di negaranya tanpa harus meninggalkan jati dirinya yang asli. Tidak ada barang produksi di Dunia ini yang tidak diproduksi oleh Tiongkok, perusahaan *start up* seperti Ali Baba menjadi penantang terbesar bagi Amazon dan Baidu yang digadagadangkan akan menjadi *the next* Google. Dengan dipimpin oleh CPC/*Communist Party of China* yang merupakan satu-satunya *rulling party* di Tiongkok bukan berarti rakyat Tiongkok tidak melakukan proses demokrasinya, mereka juga ikut memilih perwakilan mereka untuk berada di dewan kongress nasional. Dengan menerapkan

sistem SEO atau *State Owned Enterprise* pemerintah memiliki andil dalam setiap kegiatan perdagangan yang terjadi dan memiliki kontrol yang ada di Tiongkok. Seperti pernyataan dari Presiden Xi tentang bagaimana demokrasi berjalan di Tiongkok, mereka memiliki cara yang berbeda dengan sistem yang diterapkan Barat. Demokrasi sosialis yang diterapkan Tiongkok merupakan bagian dari bagaimana rakyat Tiongkok dilibatkan. Ia mengatakan bahwa demokrasi versi barat bukan untuk Tiongkok,¹⁶ dan ini bukan berarti Tiongkok kurang demokratis jika dibandingkan dengan Amerika.

Satu lagi negara yang menerapkan perpaduan antara demokrasi dan kearifan lokal adalah seperti yang terjadi di Iran. Gaya demokrasi yang terjadi adalah perpaduan dengan agama. Republik Islam Iran adalah perpaduan kepemimpinan yang dipandu oleh para ulama dan disatu sisi merupakan bentuk republik dimana negara dimiliki oleh masyarakat dan bukan penguasa yang memungkinkan tidak adanya sistem dinasti. Meskipun banyak tentangan dari Dunia barat tentang bagaimana Iran menjalankan demokrasi versinya tetapi tidak dapat kita pungkiri perpaduan antara Republik dan Islam dalam satu wadah menjadikan Iran merupakan penantang potensial Amerika di wilayah Timur Tengah.

Seperti yang terjadi di Tiongkok dan Iran, sebenarnya Indonesia diatas kertas merupakan perpaduan antara praktek demokrasi dan pancasila tetapi terbentur dengan beragam masalah yang sudah penulis sampaikan diatas. Pancasila merupakan faktor

¹⁶ G.E, "What China Means by Democracy", <http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2014/11/economist-explains-21> (Minggu, 5 Februari 2017)

penyokong yang paling pas untuk masyarakat Indonesia karena ia lahir sebagai kearifan lokal dan yang membuat demokrasi di Indonesia relatif lebih tentram. Negara lain yang memiliki potensi untuk melakukan perpaduan antara demokrasi dan identitas nasionalnya adalah Polandia. Dengan apa yang terjadi di Polandia saat ini bukan tidak mungkin ia akan memberikan gaya baru dengan menggabungkan demokrasi di satu sisi dan komunisme di sisi yang lain. Penguasa Polandia saat ini merasa bahwa demokrasi bukanlah jawaban memuaskan untuk semua pihak sehingga dibutuhkan cara-cara revolusioner untuk menentukan takaran yang tepat bagi demokrasi di Polandia.

Perpaduan demokrasi dengan identitas nasional merupakan hal yang penulis prediksi akan terjadi di masa depan. Setiap negara akan mencoba untuk mencari bentuk yang paling sempurna dari demokrasi yang akan diterapkan di negaranya dan tentu hal ini tidak akan terjadi dalam waktu semalam, butuh proses yang panjang dan *trial and error* yang mungkin memakan biaya dan energi yang banyak. Pada akhirnya demokrasi liberal bukan merupakan jawaban yang pas untuk menjadi *default system*. Tidak akan ada *default system* dimasa depan karena setiap negara dan bangsa unik dan menyamaratakan sistem merupakan suatu kerugian dan pendangkalan bagi negara-negara untuk maju menjadi sejajar dengan cara mereka sendiri. Demokrasi merupakan *draft* awal bagi negara-negara di Dunia untuk menentukan wajah mereka dan bukan merupakan proses *final*. Pada dasarnya memang demokrasi perlu untuk dibatasi kebebasannya dan membutuhkan proteksi dari pemimpin, yang dibutuhkan Dunia saat ini adalah seorang diktator yang baik hati, yang artinya ia akan keras

